

## Wapres Ma'ruf Minta Integrasi Data Penyandang Disabilitas

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, saat ini Indonesia masih memerlukan integrasi data tentang sebaran dan karakteristik penyandang disabilitas di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam acara webinar Dialog Indonesia Inklusif secara virtual, Kamis (14/1). "Tugas penting yang harus segera dituntaskan adalah menyusun data nasional penyandang disabilitas yang terintegrasi, yang menggambarkan keseluruhan populasi dengan ragam disabilitas, dan karakteristik dari masing-masing disabilitas," ujar Ma'ruf.

Dari laporan yang diterimanya, saat ini terdapat beberapa sumber data di beberapa kementerian dan lembaga terkait penyandang disabilitas tersebut. Antara lain data Susenas 2018 di Badan Pusat Statistik (BPS), Data Riskasdas 2018 di Kementerian Kesehatan (Ke-

menkes), dan data Kementerian Sosial (Kemensos) 2021.

Ma'ruf mengatakan, menurut data yang dihimpun oleh Kemensos melalui Sistem Informasi Manajemen Penyandang Disabilitas (SIMPDI) hingga tanggal 13 Januari 2021, jumlah penyandang disabilitas yang terdapat ada sebanyak 209.604 orang. "Dengan tertatanya sistem pendataan disabilitas, maka kebijakan dan perencanaan program disabilitas akan lebih tepat sasaran sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas," ucap dia.

Terlebih, hal tersebut integrasi data juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. ● vdp

## MK Tolak Gugatan Rizal Ramli soal Presidential Threshold

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima judicial review UU Pemilu yang diajukan Rizal Ramli karena tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan judicial review atas norma presidential threshold. Aturan itu dinilai Rizal mengangajal dirinya jadi capres. Namun saat diminta bukti dukungan itu, Rizal Ramli tidak bisa membuktikannya.

"Pokok permohonan pemohon tidak bisa dipertimbangkan. Mengadili permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang MK yang disiarkan lewat channel YouTube MK, Kamis (14/1).

Permasalahan berupa banyak jumlah orang yang bisa ikut capres, bukanlah masalah konstitusionalitas. Presidential threshold adalah kebijakan politik terbuka, bukan masalah konstitusionalitas.

Rizal Ramli mengklaim pernah didukung oleh parpol untuk menjadi capres. Tapi hal itu tidak terwujud karena terbentur presidential threshold. "Seandainya memang

benar didukung parpol atau gabungan parpol, Pemohon I mestinya menunjukkan dukungan dalam batas penalaran yang wajar menunjukkan bukti dukungan itu ke MK," ujar hakim MK Arief Hidayat.

Sebelumnya, Rizal Ramli melakukan uji materi terhadap presidential threshold yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Presidential threshold merupakan angka persentase seseorang bisa menjadi calon presiden.

Rizal meminta aturan itu dihapus sehingga setiap parpol bisa mencalonkan setiap orang menjadi calon presiden. Rizal Ramli menjelaskan alasannya mengajukan uji materi ini. Dia mengaku ingin seleksi kepemimpinan di Indonesia lebih kompetitif.

"Saya ingin seleksi kepemimpinan Indonesia kompetitif, yang paling baik nongol jadi pemimpin, dari presiden sampai ke bawah. Itu hanya kita bisa lakukan kalau threshold ambang batas kita hapuskan jadi nol," kata Rizal Ramli waktu mendafatar. ● dot



IDN/ANTARA

**VAKSINASI COVID-19 UNTUK TENAGA KESEHATAN** Seorang dokter memberikan salam sesuai penyuntikan vaksin Covid-19 di RS Siloam TB Simatupang, Jakarta, Kamis (14/1). Program vaksinasi Covid-19 tahap pertama kepada tenaga kesehatan mulai dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

## Soal Insiden Km 50, Komnas HAM Tak Temukan Indikasi Pelanggaran HAM Berat

JAKARTA (IM) - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik meluruskan kesimpulan-kesimpulan yang beredar terkait pelanggaran HAM dalam kasus tewasnya laskar FPI pengawal Habib Rizieq Shihab. Komnas HAM menyatakan ada pelanggaran HAM tapi bukan pelanggaran HAM berat.

"Kami menyampaikan sebagaimana sinyalemen di luar banyak beredar bahwa ini dikatakan, diasumsikan, sebagai pelanggaran HAM yang berat. Kami tidak menemukan indikasi ke arah itu," kata Taufan Damanik dalam konferensi pers bersama Menko Polhukam Mahfud MD, Kamis (14/1).

Taufan Damanik menyebut sebuah pelanggaran HAM berat punya sejumlah indikasi yang harus terpenuhi. Sekali lagi dia menegaskan kasus tewasnya laskar FPI tak terindikasi sebagai pelanggaran HAM berat.

"Karena untuk disebut sebagai pelanggaran HAM berat tentu ada indikator, ada kriteria, misalnya ada satu perintah yang terstruktur, terkemando, dan lain-lain, termasuk juga indikator isi, ruangan, kejadian, dan lain-lain. Itu tidak kita temukan karena itu memang kami berkesimpulan ini merupakan satu pelanggaran HAM karena ada nyawa yang hilang," ucap Taufan.

Komnas HAM merekomendasikan kasus tewasnya laskar FPI dibawa ke peradilan pidana. Laskar FPI ini tewas ditembak petugas kepolisian karena terlibat bentrokan. "Untuk selanjutnya kami rekomendasikan agar dibawa ke peradilan pidana untuk membuktikan apa yang kita indikasikan sebagai unlawful killing," ucap Taufan.

Temuan terkait tewasnya laskar FPI ini sudah disampaikan Komnas HAM ke Presiden Jokowi, Kamis pagi. Temuan ini disebut Komnas HAM diapresiasi Jokowi. ● osm

# 2 | Polhukam

IDN/ANTARA



## PENCARIAN PESAWAT SRIWIJAYA AIR SJ 182 DILANJUTKAN

Sebuah pesawat udara patroli maritim CN-235 milik Puspenerbal melintasi di atas sejumlah tim SAR gabungan yang melakukan pencarian korban dan puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (14/1/2021). Tim SAR gabungan pada hari keenam kembali melakukan pencarian dari puing dan korban dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 dengan tujuan Jakarta-Pontianak yang jatuh di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang pada Sabtu (9/1).

## Presiden Jokowi: Optimalkan Pencegahan Pendanaan Terorisme Berkedok Donasi

"Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme harus terus kita antisipasi. Kondisi yang mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan harus kita mitigasi. Seperti shadow economy, peningkatan kecelakaan ekonomi, serta cyber crime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru," ujar Presiden Jokowi.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti pendanaan terorisme berkedok donasi kemanusiaan. Jokowi meminta proses pencegahan dimaksimalkan.

"Selain itu, optimalkan juga peran satgas daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DDTOT) untuk mencegah pendanaan terorisme yang dihimpun melalui

donasi masyarakat. Berkedok sumbangan kemanusiaan dan upaya lain yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat," kata Jokowi dalam acara Pertemuan Koordinasi Tahunan Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pidana Pencucian Uang dan Tindakan Pidana Pendanaan Terorisme yang diselenggarakan oleh PPAATK secara

virtual, Kamis (14/1).

Jokowi berharap semua hal yang mengganggu stabilitas ekonomi dapat dimitigasi. Ia juga berbicara potensi kejahatan lain yang menggunakan teknologi baru.

"Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme harus terus kita antisipasi. Kondisi yang mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan harus kita mitigasi. Seperti shadow economy, peningkatan kecelakaan ekonomi, serta cyber crime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru," ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta ada sinergi antara sektor publik dan privat. Dua sektor tersebut diharapkan dapat membuat terobosan-terobosan baru, khususnya dalam penyelamatan aset-aset negara.

"Dengan membentuk public private partnership anti-

pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia. Seperti antara lain melalui Indonesian (Financial) Transaction Report and Analysis Center atau INTRAC," kata Jokowi.

Pesan juga disampaikan Jokowi kepada aparat penegak hukum.

"Kepada aparat hukum saya minta komitmen dan konsistensinya dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang agar mampu memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana," tutur dia.

Jokowi juga berharap Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berperan lebih besar untuk mengembangkan ekosistem keuangan yang kondusif. Jokowi meminta PPATK mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi

yang makin canggih.

"Kami mengharapkan PPATK berperan lebih besar untuk mendukung pengembangan ekosistem keuangan yang kondusif bagi pembangunan nasional. Tidak hanya menjadi world class financial intelligence unit, tetapi berkontribusi lebih besar untuk membantu program-program pemerintah serta memberantas tindak pidana korupsi yang semakin beragam dan semakin canggih," kata Jokowi.

PPATK juga diminta ikut mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis. Para calon pejabat itu agar dipastikan rekam jejak transaksi keuangan yang bersih.

"PPATK juga perlu membantu mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis dengan aktif melakukan penelusuran rekam jejak calon pejabat publik, serta memastikan rekam jejak transaksi keuangan yang bersih," ujar Jokowi. ● pan

## KPK Minta Pemerintah Segera Susun Payung Hukum Vaksinasi Mandiri

JAKARTA (IM) - KPK meminta pemerintah segera menyusun payung hukum terkait vaksinasi mandiri. Sebab, hingga kini aturan vaksinasi mandiri belum ditetapkan oleh pemerintah.

"Pelaksanaan vaksinasi itu belum ditetapkan dan belum ada payung hukum bagi kementerian lembaga yang ditugaskan untuk mengadakan vaksin mandiri atau komersial," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam webinar bersama HMI, Kamis (14/1).

Lili menyebut ada peluang sejumlah perusahaan bidang kesehatan untuk memanfaatkan kebutuhan vaksin di tengah masyarakat yang membutuhkan vaksin. Dia pun menyinggung terkait program keluarga berencana (KB) yang akhirnya menjadi ladang usaha perusahaan untuk masyarakat berduit.

"Ada KB kalau mau gratis ke puskesmas, tapi ada orang-orang lebih berpunya dia nggak mau ke Puskesmas dia beli sendiri," ujar Lili.

KPK menyarankan pemerintah segera membentuk aturan vaksinasi mandiri. Agar, perusahaan itu tidak mematok harga semuanya untuk pelaksanaan vaksinasi.

"Kemudian langkah saran kita adalah menyusun payung hukum bagi kementerian atau lembaga yang ditugaskan untuk mengadakan vaksin mandiri. Itu yang kita sarankan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri BUMN untuk bisa

dilaksanakan," katanya.

Lili juga berbicara potensi kerugian negara dalam program pengadaan vaksin korona.

Menurutnya, vaksin Covid-19 yang dibeli masih ada kemungkinan untuk gagal uji klinis dan tak dapat digunakan.

"Karena dari keterangan yang ada bahwa, vaksin tersebut dimasukkan dalam satu dus itunya 10 misalnya dan cooler itu akan dibawa sampai ke tingkat provinsi, kalau keluar dari cooler itu dia sudah maksimal bertahan enam jam, lewat enam jam dia tidak laku, dia tidak bisa digunakan apa pun," katanya.

Ia juga mengingatkan tentang struktur geografis Indonesia. "Sepertinya mendistribusikan ini dengan wilayah jarak tempuh yang berbeda-beda, kita tahu geografi Indonesia sangat luar biasa unik dan indahny, tapi juga belum semua punya sarana dan prasarana yang baik," tambah Lili. ● mar

## Satgas Tegaskan Siapa Pun yang Buat Rakyat Tak Percaya Vaksin Harus Dilawan

JAKARTA (IM) - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta masyarakat tidak ragu lagi dengan vaksinasi korona. Doni menilai pengorbanan Presiden Jokowi menjadi yang pertama divaksinasi Covid-19 luar biasa.

"Kita sederhana Pak, Bapak Presiden saja sudah divaksin Pak. Artinya, seorang kepala negara, kepala pemerintahan yang telah bersedia menjadi orang pertama divaksin kalau ada risiko, Pak, itu tidak mungkin, dan seorang kepala negara itu proteksi keamanan, proteksi kesehatannya itu luar biasa Pak," kata Doni Monardo dalam raker bersama Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1).

Doni mengatakan sejauh ini tidak ada gejala yang dirasakan oleh sejumlah orang yang telah disuntik vaksin, termasuk Presiden Jokowi. Untuk itu, menurutnya, tidak ada lagi alasan untuk tidak melakukan vaksin.

"Jadi sebelum Bapak Presiden itu mendapat vaksin, maka ada sejumlah pihak yang telah dilakukan sebelumnya. Dan mereka kami mintain pendapat dan masukannya. Tidak ada satu pun yang mengalami gejala sampai hari ini, Pak, sehingga Bapak Presiden telah divaksin dan ini tidak ada alasan lain bagi kita, untuk tidak percaya," ucapnya.

"Mohon dalam forum ini siapa pun yang berusaha untuk membuat rakyat tidak percaya harus kita lawan bersama-sama. Tidak boleh kita biarkan," sambung Doni.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat berharap momen ini menjadi peleton semangat dan kesadaran baru bagi masyarakat agar semakin peduli pada keselamatan diri dan sesama dalam menghadapi pandemi.

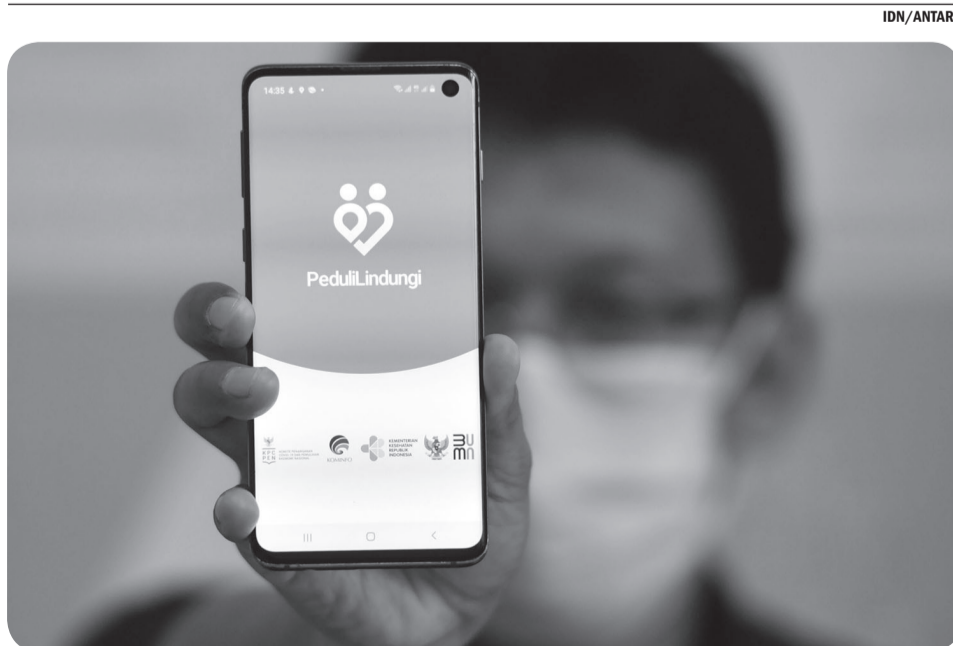
"(Rabu) Kemarin (13/1) Presiden, sejumlah pejabat negara, figur publik dan tokoh masyarakat telah divaksin. Saya berharap mereka bisa menjadi contoh teladan bagi masyarakat dalam merespons program vaksinasi Covid-19 secara nasional ini," kata wanita yang akrab disapa Rerie tersebut dalam keterangannya, Kamis (14/1).

Ia berharap para peja-

bat dan tokoh masyarakat yang mendapat kesempatan divaksin lebih awal mampu memberi testimoni yang jujur dan transparan agar bisa memotivasi masyarakat untuk ambil bagian dalam program vaksinasi nasional. Selain testimoni yang jujur, ia juga berharap para tokoh masyarakat dan figur publik tersebut juga bisa memberi contoh yang baik dalam berperilaku usai divaksinasi Covid-19.

Rerie mengaku masyarakat saat ini memang miskin teladan yang baik dalam sejumlah hal, sehingga sangat membutuhkan teladan dari para figur publik dan tokoh masyarakat, termasuk teladan untuk memotivasi masyarakat agar sadar pentingnya vaksinasi Covid-19.

Menurutnya, yang juga perlu ditegaskan kepada masyarakat adalah protokol kesehatan Covid-19 harus tetap dijalankan secara disiplin meski seseorang sudah mendapat vaksinasi Covid-19. "Bila hanya dilakukan salah satu saja maka kita akan memperpanjang masa krisis kesehatan dan krisis ekonomi seperti saat ini," pungkasnya. ● pan



IDN/ANTARA

### APLIKASI PEDULI LINDUNGI

Seorang warga menunjukan aplikasi PeduliLindungi yang telah diinstal pada gawai miliknya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (14/1/2021). Selain melacak sebaran Covid-19 di Indonesia, aplikasi buatan Pemerintah Indonesia tersebut digunakan untuk mengecek dan melakukan registrasi ulang bagi calon penerima Vaksin Covid-19.

### PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Sirkulasi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Multistrada Agro International, berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan") tertanggal 26 Desember 2020 sebagaimana telah dinyatakan kembali dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.117 tertanggal 29 Desember 2020, dibuat di hadapan Wiwik Condro SH, Notaris di Jakarta, telah disetujui dan dilaksanakan pengambilalihan 64,187 saham dalam Perseroan milik PT Jasa Kencana Utama, berkedudukan di Jakarta Timur oleh PT Pertiwi Raya Perkasa Makmur, berkedudukan di Jakarta Selatan sebagai pemegang saham baru Perseroan, yang menyebabkan perubahan pengendalian atas Perseroan.

Selanjutnya, pengambilalihan saham Perseroan yang menyebabkan perubahan pengendalian atas Perseroan tersebut juga telah diberitahukan dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Penyerahan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0424501 tertanggal 29 Desember 2020.

Pengumuman ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 133 Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 15 Januari 2021

Direksi  
PT MULTISTRADA AGRO INTERNATIONAL